

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap partai politik mempunyai pola yang berbeda, dimana pada perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya partai Golkar dalam merekrut calon anggotanya mempunyai kriteria yaitu seseorang yang mempunyai potensi, mampu bertanggung jawab dan memiliki kredibilitas dan loyalitas yang tinggi terhadap partai. Partai Golkar merupakan salah satu sarana yang memiliki ragam fungsi, program partai dan dasar pemikiran. Partai Golkar dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan melalui sistem ketatanegaraan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik.

Partai politik mempunyai porsi dan peranan yang sangat penting dalam sistem Demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menentukan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan dan fungsinya sebagai agen didalam rekrutmen politik termasuk dalam partai Golkar. Struktur dalam partai Golkar terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau disebut Pimpinan Kecamatan (PK). Tentunya pada struktur atau kepengurusan sebuah partai harus melibatkan perempuan yang merupakan salah satu syarat sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur syarat partai politik menjadi peserta pemilu salah satunya adalah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat.

Isu mengenai masalah gender sudah ada di Indonesia maupun negara lain, pada dasarnya isu gender merupakan isu yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena merupakan satu warga negara yang sama dan dilindungi oleh konstitusi Negara. Dalam konsep hukum nasional telah merumuskan apa makna kesetaraan gender seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang kesetaraan gender dimana dinyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui tindakan kesetaraan gender dibidang kewarganegaraan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, administrasi dan kependudukan, perkawinan, hukum, politik dan pemerintahan, lingkungan hidup, sosial dan budaya, dan komunikasi dan informasi. Selama ini banyak anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk berpartisipasi didunia politik, karena perempuan dianggap memakai perasaan dalam mengambil keputusan sehingga tidak cocok dalam pengambilan keputusan politik, pikiran masyarakat inilah yang membuat banyak perempuan tidak mendapat tempat dalam dunia politik. Kesetaraan gender dan keadilan, baik dalam hak politik maupun peran politik serta keberadaan dalam lembaga-lembaga politik, masih belum terwujud dan masih tertinggal jauh. Pada hal berbagai kebijakan yang menyangkut harkat dan

kehidupan orang banyak termasuk perempuan dan anak-anak dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga apabila perempuan tidak terwakili suaranya di kedua lembaga tersebut akan sulit mengharapkan produk-produk hukum yang berspektif gender dan keikutsertaan perempuan didalam proses pengambilan kebijakan adalah merupakan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis.

Seiring dengan perubahan kondisi dan struktur masyarakat, termasuk pendekatan gender yang berkembang akhir-akhir ini dapat dilihat semakin besarnya peran perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas. Perempuan telah bergerak dari keterbelakangan pendidikan menuju perempuan berpendidikan. Perempuan juga telah berperan pada wilayah publik, termasuk beberapa diantaranya menjadi pejabat publik. Gender menjadi aspek dominan dalam politik, dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, gender juga terlibat di dalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih real dalam masalah perburuhan, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam partai. Dalam konteks demokrasi jelas posisi ini tidak menguntungkan perempuan, sistem nilai patriarki menempatkan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Hal tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada perempuan kelas bawah maupun kelas atas. Kesetaraan gender dan keadilan baik dalam hak politik maupun peran politik

serta keberadaan dalam lembaga-lembaga politik, masih belum terwujud dan masih tertinggal jauh.

Rekrutmen politik mempunyai peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik.

Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Namun, kenyataan yang terjadi dalam masyarakat fenomena ini bergeser seiring dengan perubahan kondisi dan struktur masyarakat, termasuk pendekatan-pendekatan gender yang berkembang akhir-akhir ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya peran perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas. Perempuan juga telah keluar dari sekedar mengurus urusan domestik, melainkan berperan pada wilayah publik.

Keterwakilan perempuan di DPC Golkar Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak masih mengalami beberapa hambatan. Dapat dilihat belum banyak perempuan yang terlibat dalam kepengurusan partai politik seperti menjadi ketua. Perempuan memang diberi kesempatan untuk terlibat dalam struktur kepengurusan DPC Golkar Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak namun hanya 6 orang dari total anggota 21 orang yang menjabat.

Adapun struktur kepengurusan DPC Golkar Kecamatan Sengah Temila dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Kepengurusan Organisasi DPC Partai Golkar Kecamatan Sengah Temila
Kabupaten Landak Tahun 2021-2025

No	Jabatan	Nama	L	P
1	Ketua	Claudio Amor De Rosario		
2	Wakil Ketua	Mardi		
3	Sekretaris	Sritiana		
4	Wakil Sekretaris	Retno Yadi		
5	Bendahara	Erna		
6	Wakil Bendahara	Tika Yanti		
7	Anggota	F. Adiran Sakra		
8	Anggota	Alesius		
9	Anggota	Yusmanto		
10	Anggota	Sriwanti		
12	Anggota	Hendri		
13	Anggota	Alexander Lorent		
14	Anggota	Oktapius		
15	Anggota	Sumiati		
16	Anggota	Sugito		
17	Anggota	Oktavianus Robi		
18	Anggota	Muliadi		
19	Anggota	Suprianus Mongo		
20	Anggota	Kristianus Suwandi		
21	Anggota	Monika Elvi		

sumber : DPC Partai Golkar Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tahun 2021-2025

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa keterwakilan perempuan Partai Golkar di DPC Sengah Temila Kabupaten Landak masih memiliki beberapa kendala terkait keikutsertaan perempuan dalam kepengurusan. Pemilihan kepengurusan DPC Golkar dilakukan secara tertutup yang berarti pemilihan ini dilakukan oleh elit partai tanpa melibatkan masyarakat. Pemilihan ini juga dilakukan tanpa ketentuan apapun bagi anggota yang dipilih termasuk kualitas anggota yang dipilih. Perempuan diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari struktur kepengurusan DPC Golkar Kabupaten Landak, namun dari seluruh pengurus yang totalnya 21 orang hanya 6 orang perempuan yang menjabat. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 28% jumlah pengurus perempuan yang terlibat, jumlah ini tidak mencapai 30% dari jumlah minimal yang ditentukan oleh undang-undang, perempuan juga memengaruhi kebijakan di internal partai. Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar diresmikan pada 16 Agustus 2021 yang disampaikan oleh Fabianus Suparda yang merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Landak serta perangkat partai lainnya.

Perempuan memang diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari struktur kepengurusan DPC Golkar Kecamatan Sengah Temila, namun dari seluruh pengurus hanya 6 orang dari 21 orang yang menjabat, hal ini dapat mempengaruhi kebijakan internal partai. Adanya indikasi bahwa partai berusaha memenuhi kuota minimal 30% dalam kepengurusan tanpa memperhatikan kualitas setiap anggota. Terutama anggota pengurus perempuan kebanyakan tidak mempunyai pengetahuan atau latar belakang pendidikan di bidang politik.

Masalah keadilan dan kesetaraan gender ini merupakan suatu kendala yang banyak dialami oleh perempuan dalam keterlibatan di partai politik, karena selama ini perempuan sangat tertekan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghilangkan posisi perempuan di berbagai partai. Oleh karena itu diharapkan kesadaran bagi seluruh pengurus partai untuk melakukan suatu gerakan sehingga perempuan dalam berpolitik tidak di persulit.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses penguraian masalah yang rumit dan kompleks serta penegasan batas-batas temuan masalah penelitian. Berdasarkan paparan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kurangnya partisipasi perempuan untuk berpolitik dan terlibat dalam kepengurusan partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yaitu sebanyak 6 orang perempuan dari 21 pengurus secara keseluruhan.
2. Adanya indikasi bahwa partai berusaha memenuhi kuota 30% tanpa memperhatikan kualitas setiap anggota yang dipilih secara tertutup.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memfokuskan penelitian pada : pola rekrutmen kader perempuan dan kualitas setiap anggota perempuan yang terlibat dalam kepengurusan Partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

1.4 Rumusan Masalah

Dilihat dari luasnya cakupan masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut : “Bagaimana Pola Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pada Pola Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pengembangan dalam bidang ilmu politik khususnya rekrutmen kader perempuan Partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
2. Menambah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan.

1.6.2 Manfaat Praktis :

1. Memberikan informasi tentang pola rekrutmen Kader Perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar di DPC Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
2. Memberikan bahan rujukan kepada penelitian-penelitian selanjutnya.